GOVERNANCE: Jurnal Ilmiah Kajian Politik Lokal dan Pembangunan
ISSN: 2406-8721 (Media Cetak) dan ISSN: 2406-8985 (Media Online)
Volume 13 Nomor 10 Oktober 2026

PENERAPAN *COLLABORATIVE GOVERNANCE* DALAM PENGELOLAAN SAMPAH ORGANIK DI DESA KULO KECAMATAN KULO

Reza[1], Muhammad Ikbal[2], Sundari[3]
[1,2,3]Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Sidenreng Rappang
Email Korespondensi: rezasyafrudin04@gmail.com

ABSTRACT

Organic waste management at the village level faces challenges involving not only technical aspects but also the engagement and coordination of various actors. This study aims to analyze implementation of collaborative governance for organic waste management in Kulo Village, Kulo District, focusing on initial conditions, institutional design, facilitative leadership, and collaborative processes, while also identifying supporting and inhibiting factors. A qualitative descriptive method was employed, with data collected through observation, in-depth interviews, and documentation. Data analysis utilized the Miles and Huberman model with the aid of NVivo software. The results indicate that collaborative governance in organic waste management in Kulo Village has not yet functioned optimally. Initial conditions were characterized by low public awareness and limited experience with cooperation; institutional design lacked clear regulations and collaboration mechanisms; facilitative leadership was predominantly manifested through public outreach; and collaborative processes lacked structure and sustainability. Supporting factors included actor participation and commitment, mutual trust, and clarity of roles and responsibilities. Inhibiting factors included low community capacity and participation, imbalances in resources and roles, and weak coordination and communication. Strengthening institutional frameworks, coordination, facilitative leadership, and community participation is essential to establish more effective and sustainable collaboration.
Keywords: Collaborative governance, Organic waste management, Kulo Village

ABSTRAK

Pengelolaan sampah organik di tingkat desa menghadapi persoalan yang tidak hanya berkaitan dengan aspek teknis, tetapi juga dengan keterlibatan dan koordinasi antaraktor. Penelitian ini bertujuan menganalisis penerapan collaborative governance dalam pengelolaan sampah organik di Desa Kulo Kecamatan Kulo berdasarkan aspek kondisi awal, desain kelembagaan, kepemimpinan fasilitatif, dan proses kolaboratif serta mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambatnya. Penelitian menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Data dianalisis menggunakan model Miles dan Huberman dengan bantuan NVivo. Hasil penelitian menunjukkan bahwa collaborative governance dalam pengelolaan sampah organik di Desa Kulo belum berjalan optimal. Kondisi awal ditandai rendahnya kesadaran masyarakat dan pengalaman kerja sama, desain kelembagaan belum didukung regulasi dan mekanisme kolaborasi yang jelas, kepemimpinan fasilitatif masih dominan dalam bentuk sosialisasi, sedangkan proses kolaboratif belum berlangsung secara terstruktur dan berkelanjutan. Faktor pendukung meliputi partisipasi dan komitmen aktor, kepercayaan antaraktor, serta kejelasan peran dan tanggung jawab. Faktor penghambat meliputi rendahnya kapasitas dan partisipasi masyarakat, ketidakseimbangan sumber daya dan peran, serta lemahnya koordinasi dan komunikasi. Penguatan kelembagaan, koordinasi, kepemimpinan fasilitatif, dan partisipasi masyarakat diperlukan untuk membangun kolaborasi yang lebih efektif dan berkelanjutan.
Kata kunci: Collaborative governance, Pengelolaan sampah organik, Desa Kulo.

ISSN: 2406-8721 (Media Cetak) dan ISSN: 2406-8985 (Media Online)
Volume 13 Nomor 10 Oktober 2026

PENDAHULUAN

Permasalahan sampah merupakan isu publik yang semakin kompleks dalam konteks pembangunan berkelanjutan karena tidak hanya berdampak pada pencemaran lingkungan, tetapi juga memunculkan persoalan kesehatan, sosial, dan ekonomi masyarakat. Menurut (Endri Damanhuri, 2018), persoalan sampah tidak dapat dipahami hanya sebagai masalah teknis pengumpulan dan pembuangan, melainkan sebagai suatu sistem pengelolaan yang melibatkan berbagai komponen dan aktor secara terintegrasi. Pengelolaan sampah yang efektif memerlukan keterpaduan antara pemilahan di sumber, pengumpulan, ketersediaan sarana dan prasarana, serta pengolahan akhir yang berkelanjutan. Kompleksitas sistem tersebut menunjukkan bahwa pengelolaan sampah tidak dapat diselesaikan oleh satu pihak saja, sehingga menuntut adanya kerja sama dan koordinasi antaraktor. Oleh karena itu, pengelolaan sampah perlu dipandang sebagai proses kolektif yang membutuhkan keterlibatan berbagai pemangku kepentingan agar dapat berjalan secara efektif dan berkelanjutan.

Permasalahan sampah di Indonesia tercermin dari data (Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, 2024), yang menunjukkan bahwa total timbulan sampah nasional mencapai 37,22 juta ton per tahun. Dari jumlah tersebut, sekitar 12,01 juta ton atau 32,27 persen telah terkelola, sedangkan 25,21 juta ton atau 67,73 persen masih belum tertangani secara memadai. Tingginya proporsi sampah yang tidak terkelola menunjukkan adanya kesenjangan antara peningkatan timbulan sampah dan keterbatasan kapasitas pengelolaan, baik dari sisi kelembagaan, sumber daya, maupun partisipasi masyarakat. Kondisi ini menegaskan bahwa persoalan sampah di Indonesia merupakan persoalan tata kelola publik yang membutuhkan pendekatan komprehensif dan kolaboratif.

Sampah organik merupakan jenis sampah yang paling dominan di Indonesia, terutama yang berasal dari aktivitas rumah tangga dan sektor pertanian. Menurut (Yusmaman et al., 2023), sampah organik yang tidak dikelola dengan baik akan mengalami pembusukan dan menghasilkan gas metana serta leachate yang berpotensi mencemari tanah dan air tanah. Di sisi lain, sampah organik memiliki potensi besar untuk diolah menjadi kompos atau produk bernilai guna lainnya, namun potensi tersebut sering tidak dimanfaatkan secara optimal akibat lemahnya sistem pengelolaan dan rendahnya partisipasi masyarakat dalam pemilahan sampah di sumber.

Dalam perspektif tata kelola publik, pemerintah memiliki keterbatasan sumber daya, kapasitas, dan jangkauan dalam mengelola persoalan kompleks seperti sampah. (Ramadan, 2025) menegaskan bahwa keberhasilan pelayanan publik tidak hanya ditentukan oleh peran pemerintah, tetapi juga oleh keterlibatan masyarakat dan aktor non-pemerintah. Pengelolaan sampah organik sangat bergantung pada perubahan perilaku masyarakat, sehingga pendekatan yang bersifat *government-centric* cenderung kurang efektif dan memerlukan pendekatan yang lebih inklusif dan kolaboratif.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah memberikan dasar hukum bagi pemerintah daerah untuk melaksanakan pengelolaan sampah secara berkelanjutan. Namun, sebagaimana dijelaskan (Endri Damanhuri, 2018), implementasi kebijakan pengelolaan sampah sering menghadapi kendala koordinasi dan integrasi antaraktor. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pendekatan hierarkis belum sepenuhnya mampu menjawab kompleksitas persoalan sampah di tingkat lokal.

Permasalahan pengelolaan sampah juga dihadapi oleh Kabupaten Sidenreng Rappang. Pemerintah daerah telah memiliki Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Sampah, namun implementasinya belum berjalan optimal. Data Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sidenreng Rappang menunjukkan peningkatan timbulan sampah dari 47.802,74 ton pada tahun 2023 menjadi 48.288,33 ton pada tahun 2024, dengan sekitar 25,67 persen masih belum tertangani. Kondisi ini mencerminkan adanya kesenjangan antara kebijakan dan kapasitas pelaksanaan teknis di lapangan.

Penelitian akademik oleh (Sapri, Lukman, Citra Darwis, 2021) serta (Nurmi Surahma Dilla, Sapri, Hardianti Laduppa, 2025) di wilayah Sidenreng Rappang menunjukkan bahwa meskipun terdapat upaya pengelolaan sampah, masih dijumpai keterbatasan fasilitas, lemahnya koordinasi, dan rendahnya partisipasi masyarakat. Temuan ini memperkuat argumentasi bahwa persoalan sampah di tingkat kabupaten dan desa memerlukan pendekatan tata kelola yang lebih kolaboratif.

Permasalahan tersebut semakin nyata di tingkat desa, khususnya di Desa Kulo Kecamatan Kulo

ISSN: 2406-8721 (Media Cetak) dan ISSN: 2406-8985 (Media Online)
Volume 13 Nomor 10 Oktober 2026

Kabupaten Sidenreng Rappang. Desa Kulo merupakan wilayah agraris dengan mayoritas penduduk bekerja sebagai petani, sehingga aktivitas pertanian dan rumah tangga menghasilkan limbah organik dalam jumlah besar. Namun, hingga saat ini pengelolaan sampah organik di Desa Kulo masih terbatas.

Hasil observasi awal menunjukkan bahwa sebagian besar warga belum melakukan pemilahan sampah dan masih membuang sampah di lahan terbuka serta di pinggir jalan. Kondisi ini menimbulkan pencemaran lingkungan, bau tidak sedap, dan potensi berkembangnya vektor penyakit. Situasi tersebut diperparah oleh belum tersedianya TPS/TPS3R, tidak adanya sistem pengangkutan ke TPA, serta belum adanya regulasi desa terkait pengelolaan sampah organik. Di sisi lain, terdapat inisiatif masyarakat melalui Kelompok Perikanan Anugrah yang mengelola sampah organik dengan metode biokonversi maggot (BSF). Inisiatif tersebut menunjukkan adanya potensi kolaborasi lokal. Namun, upaya tersebut belum berjalan optimal karena lemahnya dukungan kelembagaan, belum terbangunnya proses kerja sama antaraktor, rendahnya kesadaran masyarakat dalam pemilahan sampah di sumber, serta pengumpulan sampah organik.

Kondisi tersebut menunjukkan urgensi penelitian ini. Pengelolaan sampah organik di Desa Kulo tidak cukup dipahami sebagai persoalan kurangnya fasilitas atau perilaku masyarakat semata, tetapi perlu dilihat dari bagaimana pemerintah desa, masyarakat, dan pihak pengelola dapat membangun hubungan kerja sama yang terstruktur. Apabila pola hubungan antaraktor tidak diperkuat, inisiatif pengelolaan yang telah ada berisiko bergantung pada aktor tertentu dan sulit berkelanjutan. Sebaliknya, apabila potensi aktor, sumber daya, dan komitmen yang telah ada dapat diintegrasikan melalui tata kelola kolaboratif, Desa Kulo memiliki peluang untuk membangun pengelolaan sampah organik yang lebih sesuai dengan kondisi lokal. Oleh karena itu, penelitian mengenai penerapan *collaborative governance* menjadi penting untuk mengidentifikasi kondisi kolaborasi yang ada, mengetahui faktor yang mendukung dan menghambatnya, serta memberikan pemahaman mengenai kebutuhan penguatan kolaborasi pada tingkat desa.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa persoalan pengelolaan sampah organik di Desa Kulo bukan hanya persoalan teknis, tetapi juga persoalan tata kelola publik yang kompleks. Oleh karena itu, pendekatan *collaborative governance* sebagaimana dikemukakan (Ansell & Gash, 2008) menjadi relevan untuk dikaji dalam konteks Desa Kulo.

Penerapan *collaborative governance* menjadi penting karena persoalan sampah organik di desa tidak dapat diselesaikan oleh satu pihak saja. Keterlibatan masyarakat, pemerintah desa, serta pihak lain seperti lembaga lingkungan atau sektor swasta perlu diintegrasikan dalam suatu cara tata kelola yang menyeluruh sehingga sumber daya, informasi, dan komitmen bersama dapat dimanfaatkan secara optimal. Pendekatan kolaboratif tidak hanya sekadar partisipasi warga, tetapi juga mencakup pembagian peran yang jelas, dukungan sarana prasarana, serta proses pengambilan keputusan yang konsensus. Dengan melihat kondisi empiris di Desa Kulo dan pengetahuan teoritis tersebut, hal ini menunjukkan indikasi bahwa pengelolaan sampah organik di wilayah ini mengalami kendala yang bersifat struktural dan kolaboratif.

Sejumlah penelitian terdahulu menguatkan pentingnya pendekatan kolaboratif dalam pengelolaan sampah, termasuk sampah organik. Penelitian (Pamungkas & Masqurin, 2024), menunjukkan bahwa pengelolaan sampah yang melibatkan berbagai aktor hanya dapat berjalan secara efektif apabila terdapat kerja sama yang terstruktur antara pemerintah, masyarakat, dan pihak pendukung lainnya. Penelitian tersebut menegaskan bahwa lemahnya koordinasi antaraktor seringkali menyebabkan program pengelolaan sampah tidak berkelanjutan dan berhenti pada tahap awal pelaksanaan. Selanjutnya, penelitian (Rini et al., 2021), menemukan bahwa penerapan *collaborative governance* dalam pengelolaan sampah terpadu mampu meningkatkan partisipasi masyarakat serta memperkuat sinergi antaraktor dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan program pengelolaan lingkungan. Sementara itu, (Niluh Eka Putri Setiawandari, 2023), menegaskan bahwa keberhasilan tata kelola kolaboratif sangat dipengaruhi oleh kejelasan peran masing-masing aktor, tingkat kepercayaan yang terbangun, serta keberlanjutan mekanisme koordinasi yang disepakati bersama. Namun, sebagian besar penelitian tersebut berfokus pada tingkat kabupaten atau perkotaan, sementara kajian yang secara khusus mengkaji penerapan *collaborative governance* dalam pengelolaan sampah organik di tingkat desa dengan karakter agraris masih terbatas.

Berdasarkan uraian tersebut, persoalan utama dalam pengelolaan sampah organik di Desa Kulo bukan semata-mata terletak pada aspek teknis pengelolaan sampah, melainkan pada bagaimana berbagai pihak

ISSN: 2406-8721 (Media Cetak) dan ISSN: 2406-8985 (Media Online)
Volume 13 Nomor 10 Oktober 2026

seperti pemerintah desa, masyarakat, dan kelompok pengelola dapat bekerja sama secara terstruktur dalam menangani permasalahan tersebut. Oleh karena itu, penelitian ini tidak berfokus pada teknis pengelolaan sampah, tetapi pada bagaimana pola kolaborasi antaraktor terbentuk dalam pengelolaan sampah organik melalui pendekatan *collaborative governance.*

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif untuk menganalisis penerapan *collaborative governance* dalam pengelolaan sampah organik di Desa Kulo, Kecamatan Kulo. Lokasi penelitian ditentukan secara *purposive* karena memiliki permasalahan pengelolaan sampah organik sekaligus potensi kolaborasi antaraktor. Penelitian dilaksanakan pada April–Juni 2026. Fokus penelitian mencakup empat aspek *collaborative governance* menurut Ansell dan Gash (2008), yaitu kondisi awal, desain kelembagaan, kepemimpinan fasilitatif, dan proses kolaboratif, serta faktor pendukung dan penghambat yang meliputi partisipasi dan komitmen aktor, hubungan kepercayaan, kejelasan peran dan tanggung jawab, ketidakseimbangan sumber daya dan kekuasaan, kapasitas dan partisipasi masyarakat, serta komunikasi dan koordinasi. Informan ditentukan dengan teknik *snowball sampling* hingga mencapai kejenuhan data, dengan melibatkan delapan informan yang terdiri atas Kepala Desa, Kaur Perencanaan, pihak pengelola sampah, dua tokoh masyarakat, akademisi, dan dua warga.

Pengumpulan data dilakukan melalui observasi lapangan, wawancara mendalam. semi-terstruktur, dan dokumentasi (Sugiyono, 2020). Data dianalisis secara interaktif menggunakan model Miles dan Huberman (reduksi, penyajian, dan verifikasi) dengan bantuan perangkat lunak NVivo untuk pengkodean dan pemetaan tematik (Silva et al., 2025). Keabsahan data diuji melalui triangulasi sumber (*member check*), tempat, dan waktu (Sugiyono, 2019, 2020).

PEMBAHASAN

Collaborative Governance

Hasil penelitian menunjukkan bahwa hambatan utama dalam pengelolaan sampah organik di Desa Kulo bukan disebabkan oleh tidak adanya kepedulian dari pemerintah desa ataupun pihak pengelola, melainkan karena belum optimalnya keterlibatan seluruh aktor dalam menjalankan peran masing-masing. Akibatnya, pelaksanaan program masih bergantung pada beberapa aktor utama sehingga prinsip kemitraan yang menjadi karakteristik *Collaborative Governance* belum dapat diwujudkan secara maksimal.

Secara keseluruhan, pelaksanaan Collaborative Governance dalam pengelolaan sampah organik di Desa Kulo masih menghadapi berbagai hambatan substantif. Penguatan kapasitas masyarakat, pemerataan peran antaraktor, serta peningkatan koordinasi menjadi aspek utama yang harus diprioritaskan agar kolaborasi dapat berlangsung lebih efektif dan berkelanjutan. Berdasarkan empat indikator utama menurut Ansell & Gash (2008), temuan penelitian ini disimpulkan sebagai berikut:

Kepemimpinan Fasilitatif (Facilitative Leadership)

Pemerintah Desa Kulo telah menunjukkan komitmen melalui kegiatan sosialisasi dan penyampaian imbauan. Namun, kepemimpinan yang dijalankan masih bersifat administratif dan informatif karena belum diikuti pendampingan, pengawasan, maupun keterlibatan langsung di lapangan. Akibatnya, fungsi kepemimpinan belum optimal menggerakkan masyarakat atau membangun sinergi antaraktor, sehingga pelaksanaan program masih bertumpu pada pihak pengelola.

Proses Kolaboratif (Collaborative Process)

Interaksi antara pemerintah desa, pengelola, dan masyarakat memang telah terjalin, tetapi belum berkembang menjadi kemitraan yang setara dan kolektif. Komunikasi yang ada belum menghasilkan pembagian tugas dan pengambilan keputusan bersama, di mana masyarakat umumnya hanya berperan sebagai penyedia sampah. Ketiadaan forum koordinasi dan evaluasi yang rutin menyebabkan komitmen yang ada belum terwujud dalam kerja sama yang terstruktur dan berkelanjutan.

ISSN: 2406-8721 (Media Cetak) dan ISSN: 2406-8985 (Media Online)
Volume 13 Nomor 10 Oktober 2026

Kondisi Awal (Starting Conditions)

Pelaksanaan kolaborasi diawali tanpa fondasi kerja sama masa lalu antara pemerintah desa dan masyarakat dalam pengelolaan sampah. Minimnya pengalaman kolaboratif dipadu dengan masih rendahnya kesadaran serta kebiasaan membuang sampah sembarangan menjadi tantangan awal yang cukup berat. Perubahan perilaku masyarakat belum dapat dicapai hanya melalui sosialisasi, melainkan membutuhkan proses pembinaan dan pendampingan yang berkelanjutan.

Desain Kelembagaan (Institutional Design)

Desain kelembagaan menjadi indikator yang paling lemah karena belum didukung oleh aturan dan mekanisme formal. Belum tersedianya Peraturan Desa, standar operasional prosedur (SOP), serta forum koordinasi tetap menyebabkan pelaksanaan program hanya berjalan berdasarkan inisiatif individu. Ketiadaan dasar hukum ini membuat pembinaan dan kewajiban berpartisipasi menjadi tidak mengikat, sehingga mengancam keberlanjutan program jangka panjang.

Faktor-faktor Pendukung Penerapan *Collaborative Governance*

Berdasarkan hasil penelitian, pelaksanaan Collaborative Governance dalam pengelolaan sampah organik di Desa Kulo didukung oleh beberapa faktor yang berkontribusi terhadap berlangsungnya kerja sama antaraktor, yaitu partisipasi dan komitmen aktor, hubungan kepercayaan antaraktor, serta kejelasan peran dan tanggung jawab. Ketiga faktor tersebut memiliki tingkat kontribusi yang berbeda-beda, sebagaimana ditunjukkan oleh hasil analisis NVivo yang menempatkan partisipasi dan komitmen aktor sebagai faktor yang paling dominan.

Pelaksanaan Collaborative Governance dalam pengelolaan sampah organik di Desa Kulo didukung oleh beberapa faktor kunci sebagai modal sosial. Hasil analisis NVivo menunjukkan bahwa faktor pendukung ini telah berkembang, meskipun implementasinya masih menghadapi berbagai keterbatasan. Berdasarkan perspektif Ansell & Gash (2008), temuan penelitian terhadap tiga faktor pendukung disimpulkan sebagai berikut:

Partisipasi dan Komitmen Antaraktor (Commitment to Process)

Partisipasi dan komitmen merupakan faktor pendukung yang paling dominan. Pemerintah desa dan pihak pengelola menunjukkan komitmen tinggi dalam menjaga keberlangsungan program melalui sosialisasi dan operasionalisasi pengelolaan sampah secara konsisten. Namun, komitmen ini belum berkembang menjadi tanggung jawab kolektif karena partisipasi masyarakat masih terfragmentasi dan belum merata. Pendekatan pemberdayaan serta pendampingan lebih lanjut diperlukan agar komitmen bersama dapat terwujud secara inklusif.

Hubungan Kepercayaan Antaraktor (Trust Building)

Kepercayaan antaraktor telah terbangun secara kondusif dan harmonis, terutama didasari oleh apresiasi terhadap konsistensi pihak pengelola. Meski demikian, kepercayaan yang terbentuk masih berorientasi pada personal pengelola (kepercayaan individu) dan belum berkembang menjadi kepercayaan terhadap sistem kerja sama kelembagaan. Penguatan kepercayaan kelembagaan penting untuk mendorong keterlibatan aktif masyarakat serta menjamin keberlanjutan kolaborasi tanpa bergantung pada figur tertentu

Kejelasan Peran dan Tanggung Jawab (Roles and Responsibilities)

Para aktor secara normatif telah memahami peran masing-masing—pemerintah desa sebagai fasilitator/edukator, pengelola sebagai pelaksana utama, dan masyarakat sebagai penyedia sampah. Namun, kontribusi faktor ini masih paling rendah karena pelaksanaan peran belum konsisten; pemerintah desa masih terbatas pada fungsi administratif-sosialisasi dan partisipasi masyarakat belum berkelanjutan. Akibatnya, beban operasional belum terbagi secara proporsional dan masih menumpuk pada pihak pengelola.

Faktor-faktor Penghambat

Pelaksanaan Collaborative Governance dalam pengelolaan sampah organik di Desa Kulo masih dihadapkan pada beberapa hambatan yang saling berkaitan dan mengurangi efektivitas kerja sama

antaraktor. Berdasarkan perspektif Ansell & Gash (2008), hambatan utama bukan disebabkan oleh ketiadaan kepedulian, melainkan belum optimalnya keterlibatan seluruh aktor dalam menjalankan peran masing-masing, yang disimpulkan ke dalam tiga sub-poin berikut:

Rendahnya Kapasitas dan Partisipasi Masyarakat (Stakeholder Capacity)

Rendahnya kapasitas dan partisipasi masyarakat menjadi faktor penghambat yang paling dominan. Keterbatasan pengetahuan, keterampilan, serta kebiasaan lama membuang sampah sembarangan membuat masyarakat masih sangat bergantung pada pengelola. Upaya sosialisasi dan penyuluhan pemerintah desa belum memicu perubahan perilaku yang signifikan karena belum disertai pendampingan serta pelatihan praktik secara berkesinambungan untuk menumbuhkan rasa memiliki (sense of ownership).

Ketidakseimbangan Sumber Daya dan Kekuasaan Antaraktor (Resource Imbalance)

Terdapat pemusatan beban operasional pada pihak pengelola, sedangkan kontribusi aktor lain masih terbatas pada fungsi pendukung (pemerintah desa sebatas sosialisasi dan masyarakat sebatas penyedia sampah). Dominasi satu aktor ini menunjukkan belum terwujudnya distribusi peran dan tanggung jawab yang proporsional. Akibatnya, keberlangsungan program sangat rentan karena terlampau bergantung pada kapasitas dan komitmen individu pengelola semata.

Lemahnya Koordinasi dan Komunikasi Antaraktor (Face-to-Face Dialogue)

Hubungan antaraktor pada dasarnya harmonis dan bebas konflik, namun koordinasi yang terjalin masih bersifat situasional dan terikat pada kegiatan tertentu (seperti saat sosialisasi). Ketiadaan forum komunikasi berkala menyebabkan proses evaluasi, penyelesaian masalah lapangan, dan penyelarasan persepsi tidak berjalan secara rutin. Kondisi ini menghambat terbentuknya mekanisme kerja sama yang berkelanjutan dan terstruktur.

KESIMPULAN

Berdasarkan keseluruhan hasil penelitian mengenai Collaborative Governance *dalam Pengelolaan Sampah Organik di Desa Kulo Kecamatan Kulo Kabupaten Sidenreng Rappang* , maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

Penerapan Collaborative Governance dalam pengelolaan sampah organik di Desa Kulo belum berjalan secara optimal. Ditinjau dari aspek kepemimpinan fasilitatif, pemerintah desa masih berperan sebatas memberikan arahan dan sosialisasi. Pada aspek proses kolaboratif, kerja sama antaraktor belum terlaksana secara aktif. Dari aspek kondisi awal, rendahnya kesadaran masyarakat dan minimnya pengalaman kerja sama menjadi kendala awal pelaksanaan kolaborasi. Sementara itu, pada aspek desain kelembagaan, belum adanya regulasi dan mekanisme kerja sama yang jelas menyebabkan pengelolaan sampah organik masih bergantung pada inisiatif pihak pengelola.

Faktor-faktor yang memengaruhi penerapan Collaborative Governance dalam pengelolaan sampah organik di Desa Kulo terdiri atas faktor pendukung, yaitu partisipasi dan komitmen aktor, hubungan kepercayaan antaraktor, serta kejelasan peran dan tanggung jawab, dan faktor penghambat, yaitu rendahnya kapasitas dan partisipasi masyarakat, ketidakseimbangan sumber daya dan pembagian peran antaraktor, serta lemahnya koordinasi dan komunikasi. Faktor-faktor tersebut menyebabkan pelaksanaan Collaborative Governance dalam pengelolaan sampah organik belum berjalan secara efektif.

REFERENSI

Nurmi Surahma Dilla, Sapri, Hardianti Laduppa, A. J. (2025). Peran Pemerintah dalam Pengelolaan Sampah di Pasar Sentral Rappang Kecamatan Panca Rijang Kabupaten Sidenreng Rappang. 4(2), 471–480. https://doi.org/10.55123/sosmaniora.v4i2.5322

Endri Damanhuri, T. P. (2018). Pengelolaan Sampah Terpadu.

Pamungkas, T. S., & Masqurin, S. N. (2024). Collaborative Governance dalam Pengelolaan Sampah di Kabupaten Jember. 4(3), 905–914.

Rini, J. P., Sufianti, E., & Abdullah, S. (2021). Collaborative Governance Model Integrated Waste Management in Bandung City. 564(Icas 2020), 227–231.

ISSN: 2406-8721 (Media Cetak) dan ISSN: 2406-8985 (Media Online)
Volume 13 Nomor 10 Oktober 2026

Niluh Eka Putri Setiawandari, A. K. (2023). Collaborative governance dalam pengelolaan sampah. 14(2), 149–155.

sugiyono. (2020). Metode Penelitian Administrasi. Bandung : Alfabeta.,

Ansell, C., & Gash, A. (2008). Collaborative Governance in Theory and Practice. Journal of Public Administration Research and Theory, 18(4), 543–571. https://doi.org/10.1093/jopart/mum032